



Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pendidikan Kecakapan Kerja Di LKP Inka Kabupaten Wonosobo

Ragil Fauzi¹, Muarifuddin²

^{1,2}Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Email: ragilfauzi146@students.unnes.ac.id¹, muarif@mail.unnes.ac.id²

Abstrak

Kabupaten Wonosobo terletak di Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu wilayah yang menghadapi berbagai tantangan, seperti tingkat kemiskinan yang signifikan, tingkat pendidikan yang masih perlu ditingkatkan, dan keterampilan masyarakat yang belum mencukupi untuk berdaya saing dalam sektor usaha dan industri. Tujuan penelitian ini untuk melihat proses pemberdayaan masyarakat melalui program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di LKP Inka Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat pada tahap penyadaran yang meliputi kegiatan sosialisasi dan pemberian motivasi untuk meningkatkan pengetahuan awal terkait program dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka, kemudian tahap transformasi kemampuan yang meliputi pelatihan tatabusana level II dengan pemberian teori dan praktik, ketenaga kerjaan dan pendidikan karakter. Selanjutnya tahap peningkatan kemampuan yang dilakukan untuk memperkuat potensi warga belajar yang mengantarkan pada kemandirian, LKP melakukan penyaluran kerja dan magang dengan mitra yang sudah bekerja sama sehingga sekarang warga belajar sudah memiliki pekerjaan.

Kata Kunci : Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Pendidikan Kecakapan Kerja

Abstract

The Wonosobo Regency is located in Central Java Province, and it is one of the regions facing various challenges such as a significant level of poverty, the need for improvement in education, and insufficient skills among the community to compete in the business and industrial sectors. The objective of this research is to examine the community empowerment process through the Work Skills Education (Pendidikan Kecakapan Kerja or PKK) program at the LKP Inka in Wonosobo Regency. This study utilizes a qualitative method with a descriptive research type. Data collection techniques include interviews, documentation, and observations. The research results indicate that the community empowerment process begins with the awareness stage, which includes activities like socialization and motivation to enhance initial knowledge about the program and motivate the community to increase their awareness. Next is the capability transformation stage, which involves training in Level II dressmaking, providing both theoretical and practical knowledge, job opportunities, and character education. Subsequently, the capability improvement stage is conducted to strengthen the learning potential of residents, leading to self-sufficiency. The LKP facilitates job placement and internships with partner organizations, resulting in community members now having employment.

Keywords: Poverty, Community Empowerment, Work Skills Education.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan tantangan yang dihadapi oleh semua negara di seluruh dunia, terutama di negara – negara berkembang seperti Indonesia. Banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan yang sulit diatasi oleh pemerintah, termasuk kurangnya lapangan kerja yang mewadahi, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat pengangguran (Setyowati & Melati, 2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,16 juta orang, atau sekitar 9,54% dari total penduduk. Di Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin mencapai 3,831 ribu orang, Kabupaten Wonosono sendiri memiliki tingkat kemiskinan yang berada pada peringkat kedua, yaitu sebesar 17,76%, sementara peringkat pertama dipegang oleh Kabupaten Kebumen dengan tingkat kemiskinan sebesar 17,83%. Kabupaten Wonosobo terletak di Provinsi Jawa Tengah dan memiliki luas wilayah sebesar 98.468 hektar (984,68 km²). Salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo adalah tingkat pendidikan yang rendah. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu negara. Namun, situasi ekonomi yang tidak stabil, yang ditandai oleh tingginya jumlah penduduk miskin, dapat menjadi hambatan bagi perkembangan sektor pendidikan di suatu daerah (Azis & Laut, 2020).

Situasi pendidikan di Kabupaten Wonosobo masih menghadapi berbagai hambatan dalam sistemnya. Rata – rata masa pendidikan penduduk di Wonosobo hanya mencapai 6,11 tahun, setara dengan tingkat pendidikan dasar. Dampak jangka panjang dari hal ini adalah kurangnya keterampilan dan keahlian yang khusus, sehingga lulusan sekolah belum memenuhi persyaratan yang diperlukan didunia kerja. Hal ini, pada akhirnya mengakibatkan pendidikan tidak memiliki dampak signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo (Setyowati & Melati, 2020). Kendala dalam mencapai pendidikan tinggi seringkali terkait dengan masalah kemiskinan, terutama karena biaya pendidikan yang tinggi. Walaupun pemerintah telah menerapkan kebijakan pendidikan gratis, tetapi masyarakat miskin masih menghadapi kesulitan dalam membayar biaya – biaya tambahan seperti buku dan seragam sekolah (Faiqoh & Desmawati, 2021). Penyebab lain yaitu sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten Wonosobo berprofesi sebagai petani atau pekerja kasar. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan keterampilan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas para pencari kerja, serta pelatihan yang bertujuan meningkatkan produktivitas bagi tenaga kerja.

Strategi pengentasan kemiskinan dapat difokuskan pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pemberdayaan. Menurut Kemensos (2020), ada tiga aspek penting yang dapat dieksplorasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat : (a) *Enabling* (menciptakan suasana yang mendukung) ini melibatkan penciptaan lingkungan yang mendukung perkembangan potensi masyarakat. Semua individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, dan pemberdayaan adalah usaha untuk membangun potensi ini dengan cara mendorong, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat. (b) *Empowering* (menguatkan potensi) ini berfokus pada penguatan potensi masyarakat melalui tindakan nyata, seperti penyediaan sumber daya dan peluang. Peningkatakn pendidikan, kesehatan, serta akses ke sumber – sumber ekonomi (seperti modal, teknologi, dan informasi) menjadi upaya pokok dalam pemberdayaan. (c) *Protecting* (melindungi masyarakat lemah) bagian ini berkaitan dengan melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang berada dalam posisi lebih lemah. Pemberdayaan masyarakat juga melibatkan pasrtisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi diri mereka dan komunitasnya.

Pemberdayaan masyarakat adalah tindakan untuk meningkatkan kapabilitas dan potensi masyarakat, sehingga mereka memiliki kemampuan penuh untuk mencapai potensi terbaik dalam kehidupan mereka dan berkembang secara mandiri di berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, agama, dan budaya (Widjaja, 2003) . Pemberdayaan berarti memobilisasi potensi, peluang, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat guna meningkatkan kapabilitas mereka dalam menentukan jalannya masa depan (Ummaya & Tristanti, 2021).

Proses pemberdayaan masyarakat, yang diuraikan oleh Sulistiyan (2004) terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama adalah kesadaran dan perubahan perilaku menuju perilaku yang lebih sadar dan peduli, sehingga individu merasa perlu meningkatkan kapasitas diri mereka. Tahap kedua melibatkan transformasi kemampuan, termasuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan, sedangkan tahap

ketiga adalah peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan, yang pada akhirnya menciptakan inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mencapai kemandirian. Upaya pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat agar mampu tumbuh dan berkembang dengan cara meningkatkan keterampilan mereka (Soetomo, 2009). Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meberdayakan masyarakat indonesia agar menjadi masyarakat yang sejahtera, salah satu program yang dibuat pemerintah melalui Direktorat Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) adalah meluncurkan program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan. Program itu dinamai Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha(PKW).

Menurut Kemendikbudristek, Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) adalah suatu inisiatif pendidikan dan pelatihan yang difokuskan pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Program ini ditujukan kepada peserta didik untuk membekali mereka dengan kompetensi di bidang keterampilan tertentu, yang kemudian dapat diakui melalui pemberian sertifikat kompetensi. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat terserap dengan baik di dunia usaha dan industri. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang memiliki reputasi baik, komitmen, inegritas, dan pengalaman, serta memiliki fasilitas yang mewadai seperti sarana, intruktur, dan kurikulum yang relevan untuk menjalankan program ini. Salah satu jenis lembaga yaitu Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia (2017), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) merupakan salah satu bentuk institusi Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan untuk masyarakat yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap yang diperlukan untuk pengembangan diri, peningkatan kemampuan profesional, mendukung pekerjaan, memulai usaha sendiri, atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam konteks pendidikan nonformal, yang berperan sebagai pengganti, pelengkap, dan penunjang pendidikan formal, LKP memiliki peran yang signifikan sebagai mitra pemerintah dalam membantu menciptakan masyarakat yang lebih mandiri (Pratiwi & Nugroho, 2022) .

Program – program yang dapat dijalankan oleh lembaga kursus dan pelatihan, seperti yang dijelaskan dalam pasal 103 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut : Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Keterampilan Kerja, Pendidikan Keaksaraan, dan berbagai program pendidikan nonformal lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Keberadaan Lembaga Kursus dan pelatihan memiliki peran sentral dalam upaya pemberdayaan masyarakat, dimana lembaga ini berfungsi sebagai tempat di mana masyarakat dapat aktif berpartisipasi dalam upaya membangun kehidupan mereka, dengan tujuan akhir menciptakan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dinamis, dan berkembang.

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Inka merupakan salah satu lembaga pendidikan non formal di Kabupaten Wonosobo yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 45 Wonosobo, didirikan pada tanggal 19 Juli 1992. LKP Inka menyediakan berbagai macam kursus seperti menjahit, mengemudi, komputer, dan lain lain. LKP Inka sudah tiga kali menjadi lembaga yang menyelenggarakan program Pendidikan Kecakapan Kerja, hal itu terjadi karena LKP Inka merupakan lembaga yang kredible dan memenuhi semua persyaratan untuk menjadi lembaga penyelenggara program Pendidikan Kecakapan Kerja dalam bidang pelatihan menjahit atau tatabusana. Lulusan dari program ini diharapkan dapat mengoptimalkan kemampuan yang sudah mereka dapatkan dan lulusan program ini juga disalurkan untuk magang dan bekerja di tempat yang sudah bermitra dengan LKP Inka. Dengan adanya program ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan memberikan keterampilan masyarakat yang ada di Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, artikel ini mengkaji bagaimana proses pemberdayaan masyarakat. Fokus penelitian ini adalah bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dalam program Pendidikan Kecakapan Kerja. Hasil

penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di Kabupaten Wonosobo.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Merode penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji kondisi obyek secara alamiah, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama (Sugiyono, 2012). Sedangkan penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena – fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun buatan manusia, yang mencakup aspek – aspek seperti aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan fenomena yang satu dengan yang lainnya (Sukmadinata & Syaodih, 2017). Penelitian ini bermaksud mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui program Pendidikan Kecakapan Kerja di LKP Inka Kabupaten Wonosobo pada tahun 2022 dengan cara mendeskripsikan secara rinci untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dilapangan berdasarkan data yang diperoleh secara detail dan jelas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian yang terdiri dari 1 (satu) instruktur, 1 (satu) asisten instruktur, dan 6 (enam) warga belajar program PKK tahun 2022, informan penelitian terdiri dari 1 (satu) orang pengelola LKP dan 1 (satu) orang pemagang di LKP Inka Wonosobo. Proses penelitian diawali dengan merancang instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Kegiatan analisis data dalam penelitian ini menurut Miles and Huberman melalui 4 (empat) tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penrikian kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pendidikan Kecakapan Kerja di LKP Inka Kabupaten Wonosobo Tahun 2022

Pemberdayaan masyarakat melalui program Pendidikan Kecakapan Kerja di LKP Inka Kabupaten wonosobo ini dideskripsikan dan dianalisis menggunakan tahapan pemberdayaan masyarakat menurut (Sulistiyani, 2004) dengan 3 (tiga) dimensi tahapan pemberdayaan masyarakat diantaranya sebagai berikut :

1. Tahap Penyadaran dan Pembentukan Perilaku

Proses penyadaran pada pemberdayaan masyarakat melalui program Pendidikan Kecakapan Kerja di LKP Inka Kabupaten Wonosobo merupakan tahap pertama dalam kegiatan ini. Pada tahapan ini LKP Inka melakukan beberapa cara untuk dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya. Pemberian informasi juga dilakukan untuk menyediakan pengetahuan kepada masyarakat agar mereka mendapatkan informasi tentang program ini. Tujuannya adalah agar masyarakat merasa tertarik untuk mengikuti program ini. LKP Inka telah mengambil berbagai langkah untuk menyebarkan informasi ini, seperti mengirim surat kepada beberapa desa di Kabupaten Wonosobo, memasang baliho di lokasi strategis, dan membuat brosur. Selain itu, pemberian informasi juga dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram yang secara berkala di posting dalam fitur story dan post. Untuk mencapai audiens yang lebih luas, LKP Inka juga mempromosikan program ini melalui iklan yang disiarkan di saluran radio lokal Kabupaten Wonosobo. Hal ini sejalan dengan pandangan (Phang et al., 2022) yang menyatakan bahwa kampanye merupakan salah satu sarana untuk mengedukasi masyarakat dan bahwa peran pendidikan sangat penting untuk menyebarkan kesadaran.

Proses penyadaran yang dilakukan kepada masyarakat yaitu drngan cara memberikan pemahaman terkait hak untuk menjadi mampu dan memotivasi mereka agar bisa bekerja dan hidup

lebih baik, sehingga hal ini bisa untuk menumbuhkan perilaku sadar dan peduli pada masyarakat, dalam tahap ini pelaksana program memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memberikan dan membentuk pengetahuan awal terkait dengan program Pendidikan Kecakapan Kerja serta membentuk sikap masyarakat sehingga mereka merasa tertarik dan mau untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat, hal tersebut sejalan dengan penuturan amaliah (Amaliah, 2020) bahwa tahap penyadaran merupakan sebuah tahap awal dalam pemberdayaan yang berperan penting untuk meningkatkan kemauan dari masyarakat yang akan menjadi sasaran program. Sentuhan penyadaran dapat merangsang masyarakat tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik (Hidayatullah & Suminar, 2021).

Proses penyadaran juga melibatkan kegiatan sosialisasi, arahan, dan pembinaan masyarakat mengenai informasi kunci terkait dengan tujuan serta sasaran dari program pemberdayaan ini. Dalam kegiatan sosialisasi, LKP Inka juga mengundang tokoh – tokoh masyarakat yang telah sukses dan sebelumnya mengikuti program ini, dengan harapan bahwa kehadiran mereka dapat memberikan motivasi dan kesadaran kepada masyarakat. Hal ini memperjelas bahwa meskipun program ini berlangsung singkat dan gratis, jika dijalani dengan tekun, dapat membantu mereka mencapai kesuksesan. Hal ini sejalan dengan penuturan (Astuti et al., 2022) bahwa sosialisasi program penting untuk mengingatkan masyarakat akan potensi yang mereka miliki untuk berpartisipasi dalam pemecahan masalah. Motivasi, seperti yang disebutkan oleh (Niati et al., 2021) juga memiliki peran penting dalam mendorong individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik itu berasal dari interna maupun eksternal. Upaya penyadaran ini bertujuan untuk membantu masyarakat memahami masalah yang perlu diatasi dan melihat manfaat dari upaya penyelesaiannya, sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh (Suwandi, 2020). Respon positif dari masyarakat terhadap sosialisasi ini terlihat dalam motivasi mereka untuk mendaftar dan mengikuti program ini.

Dilihat dari jumlah peserta setiap tahun, terdapat peningkatan dalam partisipasi warga belajar dalam program ini. Pada tahun 2020, ada 30 peserta yang mengikuti program, diikuti oleh 31 peserta pada tahun 2021, dan meningkat menjadi 40 peserta pada tahun 2022. Meskipun demikian, tahap penyadaran ini belum sepenuhnya berhasil karena masih ada berbagai alasan yang mendasari partisipasi warga belajar dalam prgram ini. Beberapa hanya mengikuti program ini sebagai pengisi waktu luang, sementara yang lain ingin mendapatkan pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam dalam menjahit. Selain itu, karena program ini diselenggarakan oleh pemerintah dan tidak memerlukan biaya atau gratis. Banyak warga belajar yang sering membolos pertemuan. Dalam konteks ini, (Lukman, 2021) menggaris bawahi jika tahap penyadaran tidak dilaksanakan secara efektif, masyarakat dapat menjadi kurang peduli terhadap proses pembelajaran yang berlangsung dan menghadiri pertemuan terkait program hanya sesuai dengan keinginan mereka sendiri.

2. Tahap Transformasi Kemampuan

Tahap kedua dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah tahap transformasi kemampuan. Dalam tahap ini, masyarakat diberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membuka pemahaman mereka tentang keterampilan yang akan mereka kembangkan, sehingga mereka dapat ber sehingga mereka dapat berperan dalam pembangunan. Dalam konteks Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) yang diselenggarakan oleh LKP Inka Wonosobo, tahap transformasi kemampuan dilakukan melalui pelatihan tatabusana. Pelatihan ini terdiri dari dua komponen, yaitu teori dan praktik. Pemberian teori merupakan langkah awal di mana peserta belajar mendapatkan pemahaman dasar tentang keterampilan menjahit. Teori ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan awal kepada peserta sehingga mereka memiliki pemahaman yang cukup dan siap untuk mengikuti pelatihan tahap berikutnya. Dalam pembelajaran teori, peserta pertama kali dikenalkan dengan alat-alat menjahit, perlengkapan yang digunakan dalam menjahit, cara memasang benang dengan benar, dan bagaimana mengoperasikan mesin jahit.

Pemberian teori ini dilakukan selama satu minggu di ruang yang terpisah dengan ruang praktik, warga belajar juga diberikan modul-modul yang bisa dipelajari dan dipahami seperti modul menjahit pakaian pria, modul menjahit pakaian perempuan dan modul tentang Ketenagakerjaan, teori ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada warga belajar sebelum terjun langsung praktik menggunakan mesin jahit dan peralatan lainnya. Sejalan dengan hal itu (Sutarto et al., 2018) mengemukakan bahwa proses penyelenggaraan pada pembelajaran harus mencangkup kesesuaian isi materi, kebutuhan masyarakat, keluasan materi, kemudahan dan kedalaman materi untuk diperaktekkan. Kurikulum yang digunakan dalam pelatihan ini merupakan kurikulum dari pusat yang berbasis KKNI yang didalamnya sesuai dengan standar kompetensi lulusan (SKL) yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek yang berisi tentang pendidikan karakter, ketenagakerjaan dan pendidikan keterampilan.

Transformasi kemampuan adalah upaya untuk memberikan keterampilan kepada warga belajar agar mereka memiliki kecakapan tertentu. Dalam konteks ini, Program Pendidikan Kecakapan Kerja mengadakan pelatihan tatabusana. Hal ini sejalan dengan pandangan (Khurotin & Afrianty, 2018) bahwa program pelatihan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik kepada peserta program, yang pada gilirannya akan memiliki dampak positif pada pengembangan sumber daya manusia. Perspektif yang sama juga diungkapkan oleh (Ju & Li, 2019) bahwa pelatihan dapat meningkatkan efektivitas individu, tim, dan organisasi dalam pekerjaan mereka dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka.

Setelah mendapatkan wawasan pengetahuan dari teori dan materi yang diberikan kepada warga belajar langka selanjutnya yaitu melakukan praktik untuk mengaplikasikan apa yang telah mereka dapat dari pemberian teori, hal ini sejalan dengan penuturan (Fitriani et al., 2019) bahwa metode praktik merupakan salah satu metode yang efektif dalam proses pembelajaran karena pengaplikasian materi yang sebelumnya didapatkan bisa dilakukan secara langsung. Materi dalam praktik ini berfokus pada tingkat menjahit Level II, yang mencakup berbagai topik seperti pengoperasian mesin jahit, pengukuran tubuh, pembuatan pola pakaian, perencanaan kebutuhan bahan, pemotongan bahan, menjahit dengan mesin, dan penetapan harga. Meskipun pelatihan ini berada pada tingkat menjahit Level II, instruktur memberikan pembelajaran yang dimulai dari dasar karena beberapa warga belajar belum memiliki pemahaman dasar tentang menjahit. Hal ini diperlukan agar mereka dapat memahami dan menjalankan praktik dengan kompeten. LKP Inka memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan Program Pendidikan Kecakapan Kerja ini, termasuk 1 ruang teori, 1 ruang praktik yang dilengkapi dengan 45 mesin jahit, 55 kursi, dan peralatan menjahit lainnya. Meskipun terkadang mesin mengalami masalah, pihak LKP dengan cepat mengatasi kendala tersebut sehingga pembelajaran dapat berjalan lancar.

Program pelatihan ini memiliki durasi selama 35 hari dengan total 200 jam pelajaran, terdiri dari 60 jam teori dan 140 jam praktik. Pelatihan ini dilaksanakan setiap hari Senin hingga Jumat. Pelaksanaan pelatihan lebih menekankan pada pengembangan keterampilan praktis daripada penyampaian teori (Rusdin, 2017). Selain keterampilan menjahit, warga belajar juga mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan dan keselamatan kerja dalam bidang tata busana, aspek ketenagakerjaan, undang-undang ketenagakerjaan, serta etika dalam dunia kerja. Selain itu, program ini juga memasukkan unsur pendidikan karakter dalam pembelajarannya.

LKP Inka mengimplementasikan strategi untuk meningkatkan keterampilan dalam program Pendidikan Kecakapan Kerja. Strategi ini mencakup penyediaan materi sesuai dengan kurikulum, distribusi modul kepada peserta, dan mengadakan sesi diskusi agar peserta dapat mengajukan pertanyaan lebih terperinci tentang materi yang belum mereka pahami. Selain itu, LKP Inka juga menyelenggarakan program magang, di mana peserta dapat melakukan magang di konveksi mitra LKP atau mencari tempat magang sesuai pilihan mereka. Melalui magang ini, peserta dapat mengasah keterampilan praktis mereka dan mendapatkan pengalaman kerja langsung, hal ini sesuai dengan

penuturan (Sari et al., 2022) bahwa magang memungkinkan peserta untuk mengembangkan keterampilan umum dan khusus serta mendapatkan pengalaman kerja.

3. Peningkatan Kemampuan

Tahap ketiga proses pemberdayaan masyarakat yaitu peningkatan kemampuan, warga belajar diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang telah mereka peroleh untuk menciptakan kemandirian dan perubahan dalam kehidupan mereka. Peningkatan kemampuan yang terjadi dalam program ini secara efektif meningkatkan kemampuan dan keterampilan wargabelajar. Awalnya sebagian besar dari mereka tidak menyadari potensi diri mereka, namun setelah mendapatkan pemahaman dan pelatihan keterampilan, mereka menjadi mampu menjahit pakaian dan bahkan menciptakan inovasi sesuai dengan kreatifitas mereka. Hal ini tercermin dari hasil ujian kompetensi, dimana sebagian besar warga belajar berhasil mendapatkan sertifikat kompetensi. Proses ujian tersebut dilakukan oleh penguji eksternal yaitu LSK Tatabusana.

Setelah menyelesaikan pelatihan ini, warga belajar dapat membuat berbagai jenis pakaian yang seperti membuat rok, celana, kemjea, daster, blues, dan dress. Mereka yang awalnya tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan menjahit sekarang memiliki bekal yang cukup untuk bekerja dibidang tersebut. Tahap peningkatan kemampuan ini bertujuan untuk memperkuat potensi masyarakat, mendorong inovasi, dan mengembangkan kemandirian dalam menghadapi peluang yang muncul dalam pembangunan masyarakat. Hal ini tercermin dari hasil observasi, di mana warga belajar dapat menciptakan pakaian dengan desain baru, mengikuti tren fashion, dan menghasilkan produk yang dapat dijual. Sejalan dengan hal tersebut peningkatan kemampuan berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memodifikasi dan mengembangkan pengetahuan yang telah diperolehnya dalam membentuk inovasi atau kreasi-kreasi dan meningkatkan inisiatif (Lukman, 2021). Kreatifitas dan inovatif masyarakat bisa dilihat dari kemampuan mereka untuk mampu menghasilkan produk baru yang dapat dipamerkan dan dijual (Putri & Suminar, 2023). Dengan meningkatkan kemampuan seperti mengembangkan inovasi, metode, dan teknik yang telah diberikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Arbarini et al., 2022).

Tahap peningkatan kemampuan intelektual dalam pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberikan otoritas kepada masyarakat sasaran untuk mengaplikasikan keterampilan yang telah mereka pelajari selama pelatihan. Pelaksana program memberikan dukungan dan fasilitasi agar masyarakat dapat berkembang secara mandiri. Ini sesuai dengan pendapat Sumodiningrat (Sulistiyani, 2004), yang mengatakan bahwa meskipun masyarakat telah mandiri, mereka masih memerlukan perlindungan untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat ini bertujuan agar mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka melalui perubahan perilaku dan sikap (Endah, 2020). LKP Inka memiliki peran penting dalam membantu warga belajar untuk terserap dalam dunia kerja. Mereka menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan, seperti CV Mekar Abadi, PT Inti Sukses Gramindo, PT Libera Permana, Omah Jahit Basmallah, dan Sanggar Kreasi Fitri Accesoris, yang melakukan rekrutmen sesuai dengan kuota yang tersedia. Perusahaan-perusahaan ini melakukan promosi kepada warga belajar dengan menjelaskan lingkungan kerja yang menarik sehingga dapat memotivasi mereka untuk bekerja di perusahaan tersebut. Dalam tahap ini, lembaga memberikan warga belajar kewenangan untuk menerapkan pengetahuan yang telah mereka peroleh, sehingga mereka dapat mencapai kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Hasil dari program ini adalah sebagian besar lulusannya memiliki keterampilan dalam menjahit dan telah dapat bekerja atau magang di tempat-tempat yang telah bermitra dengan LKP Inka.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat melalui program Pendidikan Kecakapan Kerja di LKP Inka Kabupaten

Wonosobo dengan menggunakan tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari tahap penyiadaran, transformasi kemampuan dan peningkatan kemampuan adalah sebagai berikut:

1. Proses penyiadaran dalam program Pendidikan Kecakapan Kerja merupakan langkah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman awal kepada masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, tindakan yang diambil mencakup memberikan motivasi dan melakukan sosialisasi kepada warga yang mengikuti program ini. Upaya ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif mereka dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

2. Proses transformasi kemampuan yang dilaksanakan dalam program Pendidikan Kecakapan Kerja di LKP Inka Kabupaten Wonosobo dilakukan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan wawasan pengetahuan terkait tatabusana, ketenagakerjaan, dan pendidikan karakter. Metodenya mencakup penyampaian materi baik secara teori maupun praktik menjahit yang sesuai dengan kurikulum berbasis KKNI dan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

3. Proses peningkatan kemampuan yang dilakukan dalam program Pendidikan Kecakapan Kerja di LKP Inka Kabupaten Wonosobo antara lain pelaksanaan Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh LSK Tatabusana untuk memberikan sertifikasi tatabusana kepada warga belajar, melakukan magang untuk meningkatkan keterampilan praktis dalam dunia kerja, selanjutnya hasil menunjukkan bahwa mayoritas peserta program ini telah mampu merinovasi dalam pembuatan makian sesuai perkembangan tren mode. Sebagian besar peserta program ini telah berhasil mengejar kesempatan kerja di berbagai konveksi yang menjalin kerjasama dengan LKP Inka.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, F. N. (2020). Peran Pengelola Bank Sampah Ramah Lingkungan (Ramlil) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Perumahan Graha Indah Kota Samarinda. *Jurnal Progr. Stud. Pendidik. Masy.* 1(2)
- Arbarini, M., Suminar, T., Desmawati, L., Edy Mulyono, S., Siswanto, Y., Hasdiani, T., Dion Soraya, M., & Uswatun Hasanah, L. (2022). Pemberdayaan Perempuan Desa Dengan Keterampilan Batik Gesek Godhong Untuk Meningkatkan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian*, 02(4). <Https://Doi.Org/10.37905/Dikmas.2.4.1137-1146.2022>
- Astuti, D. I., Saraka, & Winarti, H. T. (2022). Analisis Pemberdayaan Pereempuan Berbasis Keterampilan Budidaya Tanaman Hidroponik. *Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 7(2).
- Azis, A., & Laut, L. (2020). Analisis Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2003-2019. *Dinamic: Directory Journal Of Economic*, 2(2), 460–468.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Jurnal Moderat*, 6(1).
- Faiqoh, P., & Desmawati, L. (2021). *Pemberdayaan Perempuan Melalui Home Industri Batik Sekar Jagad Di Dusun Tanuraksan Desa Gemeksekti Kabupaten Kebumen* (Vol. 1, Issue 1).
- Fitriani, R. D., Hendrawijaya, A. T., & Ariefianto, L. (2019). Peran Metode Praktek Dalam Penguasaan Keterampilan Berbahasa Inggris Peserta Pelatihan Di Lkp Andi's English Course Buduan Kabupaten Situbondo. In *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* (Vol. 3, Issue 1).
- Hidayatullah, F. A., & Suminar, T. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Candi Plaosan Melalui Program Desa Wisata Untuk Kemandirian Ekonomi Di Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten. *Lifelong Education Journal*, Vol.1, No. 1.
- Ju, B., & Li, J. (2019). Exploring The Impact Of Training, Job Tenure, And Education-Job And Skills-Job Matches On Employee Turnover Intention. *European Journal Of Training And Development*, 43(3–4), 214–231. <Https://Doi.Org/10.1108/Ejtd-05-2018-0045>
- Khurotin, N., & Afrianty, T. W. (2018). Analysis Of Training And Development Of Human Resources At Pt Beon Intermedia Malang Branch. *Journal Of Business Administration*, 61(1), 195–203.
- Lukman, A. I. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Nonformal Di Pkbm Tiara Dezzy Samarinda. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(2), 180–190. <Https://Doi.Org/10.21831/Diklus.V5i2.43669>

- Niati, D. R., Siregar, Z. M. E., & Prayoga, Y. (2021). The Effect Of Training On Work Performance And Career Development: The Role Of Motivation As Intervening Variable. *Budapest International Research And Critics Institute (Birci-Journal): Humanities And Social Sciences*, 4(2), 2385–2393. <Https://Doi.Org/10.33258/Birci.V4i2.1940>
- Phang, F. A., Roslan, A. N., Zakaria, Z. A., Zaini, M. A. A., Puspanathan, J., & Talib, C. A. (2022). Environmental Awareness In Batik Making Process. *Sustainability (Switzerland)*, 14(10). <Https://Doi.Org/10.3390/Su14106094>
- Pratiwi, N. , A., & Nugroho, R. (2022). Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Pendidikan Kecakapan Kerja (Pkk) 2021 Di Lkp Modes Ida Jombang. *J+Plus: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah*, 11(1), 64–76.
- Putri, D. P., & Suminar, T. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Pada Desa Wisata “Kampung Kokolaka” Kelurahan Jatirejo Kota Semarang. *Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 3(2), 93–103.
- Rusdin, R. (2017). Pendidikan Dan Pelatihan Sebagai Sarana Peningkatan Kompetensi Guru Di Smp Negeri 02 Linggang Bigung. *Jurnal Administrative Reform*, 5(4), 200–212.
- Sari, S., Witono, B., & Nugroha, H. (2022). Analisis Dampak Kegiatan Magang Dan Studi Independen Bersertifikat (Msib) Dalam Peningkatan Keterampilan Dan Keahlian Lulusan Program Studi Akuntansi (Magang Pada Pt. Bank Syariah Indonesia, Tbk.) *Seminar Nasional dan Call of Paper: Impelmentasi Dampak MBKM*.
- Setyowati,F. A., & Melati, I. S. (2020). Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Klasifikasi Perkotaan Dan Perdesaan. *Economic Education Analysis Journal* <Https://Doi.Org/10.15294/Eeaj.V9i3.42413>
- Soetomo. (2009). *Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmadinata, & Syaodih, N. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Gala Media
- Sutarto, J., Mulyono, S. E., Nurhalim, K., & Pratiwi, H. (2018). Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Kecakapan Hidup Berbasis Keunggulan Lokal Desa Wisata Mandiri Wanurejo Borobudur Magelang. *Jurnal Penelitian Pendidikan* (Vol. 35).
- Suwandi, M. A. (2020). Membangun Keberdayaan Nelayan: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui “Kelompok Usaha Bersama Berkah Samudra” Di Jepara, Indonesia. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2), 231-255.
- Ummaya, F., & Tristanti, T. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Homestay Di Desa Wisata. *Journal Of Nonformal Education And Community Empowerment*, 5(1), 45–53. <Https://Doi.Org/10.15294/Pls.V5i1.39849>
- Widjaja, A. (2003). *Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. P2elipi.